



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

## SAMBUTAN

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
PADA UPACARA PEMBERIAN REMISI KEPADA WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN  
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 64  
TANGGAL 17 AGUSTUS 2009**

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.*

**Hadirin peserta upacara dan segenap warga binaan pemasyarakatan yang saya hormati,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya lah, kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 64, pada hari ini Senin, tanggal 17 Agustus 2009.

Upacara memperingati Proklamasi Kemerdekaan yang selalu kita laksanakan setiap tahun ini, hendaknya bukan hanya seremonial sekedar mengenang jasa para pahlawan yang telah dengan tulus ikhlas mengorbankan harta benda bahkan segenap jiwa raganya dalam memperjuangkan Indonesia merdeka, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana seluruh elemen bangsa dapat ikut terlibat dan merasakan makna pembangunan yang kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini demi mencapai apa yang dicita-citakan dan diamanatkan Pancasila.

Melaksanakan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu keharusan yang mesti dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan tanpa henti. Kita, sebagai generasi penerus, baik sebagai individu, warga negara maupun sebagai masyarakat, dan bangsa memiliki kewajiban

dan tanggung jawab bersama untuk menunaikan tugas tersebut. Oleh karena itu masing-masing kita dituntut untuk dapat berperan serta aktif didalam pembangunan dan justru bukan sebaliknya menjadi penghambat pembangunan.

Berpartisipasi dalam melaksanakan dua kali pemilihan umum, pada tanggal 9 April 2009 kita memilih anggota legislatif dan pada tanggal 8 Juli 2009 kita memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masing-masing periode masa bakti 2009 - 2014, merupakan bentuk turut serta dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Sesuai amanat undang-undang seluruh warga negara mengikuti kegiatan pesta demokrasi tersebut, tidak terkecuali mereka yang saat itu berada di dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan. Sebagai warga negara kita wajib mendukung siapapun yang akan memimpin bangsa dan negara ini, karena kita memiliki tujuan yang sama yaitu Indonesia yang makmur dan sejahtera.

### **Hadirin peserta upacara dan segenap warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia,**

Tap MPR-RI Nomor : VI/2001 mengamanatkan untuk membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab serta dapat menjadi pelayan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan dalam bidang pelayanan, bimbingan dan pembinaan terhadap warga binaan, telah diterbitkan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.01.OT.03.01 Tahun 2008 tanggal 1 Februari 2008 Tentang Pencanangan Bulan Tertib Pemasyarakatan yang meliputi Tertib Pengamanan, Tertib Pelayanan, Tertib Perawatan dan Pengelolaan, Tertib Pembinaan dan Pembimbingan, Tertib Peri Kehidupan Penghuni. Terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/.M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi telah memperkuat dan mendorong jajaran pemasyarakatan untuk mempercepat perubahan mendasar dalam sistem pemasyarakatan, untuk itu telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.OT.02.02 Tahun 2009, tanggal 13 Januari 2009, tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Cetak Biru ini selain menjabarkan pemikiran, gagasan dan aspirasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi objektif guna merumuskan suatu formula perbaikan dan perubahan, juga sebagai pedoman yang rinci bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara menyeluruh, sekaligus sebagai titik tolak pembangunan reformasi birokrasi yang meliputi bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik.

Berkenaan dengan itu sebagai langkah awal jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu melakukan perubahan *mindset* dan *culture set* serta pengembangan budaya kerja dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi juga diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*) dan bebas KKN. Hal ini juga untuk menjawab tantangan, dimana hasil survey integritas sektor publik yang dilakukan KPK menempatkan Departemen Hukum dan HAM khususnya Pemasyarakatan dalam daftar urut terendah baik pada tahun 2007 maupun 2008, walaupun survey terbatas dilaksanakan di Wilayah DKI Jakarta. Namun disadari bahwa upaya ini tidaklah ringan serta membutuhkan waktu, tetapi bila didukung oleh seluruh aparatur Departemen Hukum dan HAM RI terutama jajaran pemasyarakatan disertai bekal tekad dan semangat yang kuat insya Allah upaya mulia ini akan berhasil dengan baik.

**Hadirin peserta upacara dan segenap warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia,**

Sejak beberapa tahun terakhir ini keadaan isi Lapas/Rutan/Cab. Rutan mengalami kelebihan kapasitas, pada akhir tahun 2009 diperkirakan akan berjumlah sekitar 140.000 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk sekitar 90.000 orang. Kondisi ini telah berdampak pada kurang optimalnya pelayanan, bimbingan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, disamping itu juga berdampak pada kerawanan keamanan dan ketertiban.

Sejauh ini kita tetap berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kapasitas dalam pelaksanaan tugas. Melalui kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Government Organization) diharapkan dapat mempercepat perubahan/perbaikan untuk mengatasi/mengurangi permasalahan yang ada.

Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada segenap warga binaan pemasyarakatan agar tetap ikut berperan aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan dan pembinaan dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran tata tertib dan peraturan, yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri dengan adanya pencabutan hak-hak tertentu.

Semoga keinginan dan harapan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tema pada upacara kali ini, yaitu **"Dengan Semangat Proklamasi Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan"**.

**Hadirin peserta upacara dan segenap warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia,**

' Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999, Tanggal 23 Desember 1999 tentang Remisi, pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 64 ini, bagi Narapidana dan Anak Pidana diberikan Remisi (pengurangan pidana). Pemberian Remisi merupakan bentuk penghargaan Negara kepada warga binaan pemasyarakatan yang berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Melalui pemberian Remisi ini diharapkan memberikan kesadaran kepada kita semua, khususnya kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan agar selalu patuh dan taat pada hukum/norma yang ada karena sesungguhnya kita mempunyai tanggung jawab baik kepada Tuhan Maha Pencipta maupun kepada sesama manusia.

**Hadirin peserta upacara dan segenap warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia,**

Pada kesempatan ini kiranya tidak berlebihan apabila saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah turut ambil bagian dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan, Saya berharap peran dan partisipasi Pemerintah Daerah ini dapat berlanjut dan ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang.

Bagi seluruh narapidana yang mendapat remisi, saya ucapkan selamat, bagi yang bebas, saya berpesan, berjanjilah pada diri anda sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, kembalilah kepada keluarga dan jadilah anggota masyarakat yang baik, jadilah insan yang taat hukum. Insya Allah, Tuhan Yang Maha Esa akan melindungi dan mengiringi keiklasan dan ketulusan saudara untuk menjadi manusia yang bermartabat, bermanfaat dan berakhlak mulia.

Akhir kata atas nama seluruh Jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, saya ucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Jajaran Pemasyarakatan yang dengan tulus ikhlas

mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdikan dan berbakti kepada nusa, bangsa dan negara dengan limpahan rahmat, nikmat dan karuniannya. Amiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

***Salam sejahtera bagi kita semua.***

